

PENGAWASAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA PEKANBARU

Florenta Poppy Indah Lestari

Dosen Pembimbing : Drs. H. Zaili Rusli, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp (0761)63277

The increase in population occurred in the city of Pekanbaru, coupled magnitude of the rate of vehicle of hin order to improve road infrastructure development through several procerses in the run, it is the process of monitorin : setting standards, assessment and improvement ini case of irregularities. This study aims to look at how the proses supervision of road infrastructure in the city of Pekanbaru, and factor are barrier to the control. Based on research in the field that the supervision of road infrastructure in the city of Pekanbaru the opinion of the author is still not good. It is seen from the results of interview and observations the researchers did in the city public works department Pekanbaru, and coupled with public opinion reveals that public works job less satisfyingfor them, because according to them is still lacking performance conducted by the city public works department Pekanbaru.

Keywords : *Controlling, standards, assessment, improvement and road infrastructure*

Secara geografis Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai Negara kepulauan, kebijakan pembangunan akan berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di Negara – Negara kontinen atau daratan, karena masing – masing pulau memiliki karakteristik geografis tersendiri dan kekayaan alam yang berbeda – beda. Dengan memperhatikan Negara kepulauan, keragaman budaya, sosial, pendidikan, dan ekonomi yang sangat tinggi, perubahan masyarakat serta tuntutan berkelanjutan maka sistem perencanaan pembangunan yang ada saat ini bersifat menyeluruh terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan jaman.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah, khususnya dalam perencanaan tata ruang. Dengan adanya penyesuaian tersebut diharapkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dimasa mendatang dapat mewujudkan struktur ruang dan pola ruang ideal sebagaimana yang diharapkan.

Berbagai kendala yang harus dihadapi dalam kaitannya dengan penataan ruang dan pengelolaan wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) **Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah**

Pada hakikatnya terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu, fungsi pelayanan pada masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban. Fungsi – fungsi tersebut diatas memerlukan ruang gerak operasi yang menuntut kebutuhan akan tata ruang. Keterpaduan penanganan ketiga fungsi tersebut akan merupakan landasan bagi keterpaduan penyusunan tata ruang dan pengelolaan wilayah yang utuh menyeluruh.

2) Keterbatasan Kemampuan Aparat

Meskipun Dinas dan instansi yang berkaitan dengan tata ruang dan pembangunan daerah sudah terbentuk, seperti misalnya Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Dinas Tata Bangunan, Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya, namun kebanyakan tidak ditunjang oleh aparat yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan tata ruang wilayah.

3) Keterbatasan Pendanaan

Demi terlaksananya rencana tata ruang daerah yang telah disusun, diperlukan dukungan dana yang memadai. Dalam keterbatasan dana seperti sekarang ini, sangat sulit bagi Pemda untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan sosial guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Sumber – sumber pendapatan daerah yang terbatas menyebabkan ketergantungan Pemda yang tinggi pada pemerintah pusat dalam bidang keuangan. Dalam hal ini terlihat pentingnya keleluasaan Pemda dalam menggunakan dana, baik daerah dana sendiri, dana dari pusat maupun sendiri, demi terlaksananya pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruangnya.

4) Kelemahan Manajemen/Pengelola

Ditilik dari pengertian manajemen sebagai pengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal, dapat dikatakan bahwa manajemen tata ruang dan pembangunan daerah di Indonesia masih lemah sekali. Bahkan dalam skala nasional pun masih terlihat kemubasiran akibat banyaknya tumpang tindih tugas yang serupa oleh berbagai instansi, dinas, atau departemen yang berbeda, tanpa koordinasi yang baik.

5) Kelemahan Mekanisme Pengendalian Pembangunan

Kendala lain yang tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan (*development control*). Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena Pemda sering kali tidak mempunyai akses terhadap rencana – rencana pembangunan sektoral, yang dibuat dan ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana - rencana yang telah disusun bisa berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara

pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah.

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.

Infrastruktur disamping memiliki keterkaitan dan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastuktur dan berfungsi baik, mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang minim dan tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan masalah sosial dan lingkungan.

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada tidak hanya di wilayah Provinsi Riau. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dan mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain – lain.

Latar belakang dari penelitian ini adalah membahas tentang infrastruktur jalan, bahwa jalan mempunyai andil dalam rangka pembangunan suatu wilayah, karena dengan prasarana yang baik maka aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik, aman, nyaman dan teratur sehingga prasarana jalan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, penataan jalan dibutuhkan agar jalan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan semua kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penataan jalan sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :

- Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil-guna dan berdaya-guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
- Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Rencana tata ruang yang merupakan rencana pemanfaatan ruang kota disusun untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan serta menjaga keserasian pembangunan antar-sektor dalam rangka penyusunan pengawasan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dititik-beratkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota adalah pelaksanaan utama pembangunan, termasuk melaksanakan pembangunan jalan perkotaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan.

Salah satu tugas Dinas Tata Ruang menurut Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah :

- a. Pelaksanaan urusan Tata Ruang dan Bangunan.
- b. Pelaksanaan urusan pengawasan bangunan.
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan Tata Ruang dan Bangunan.
- d. Pelaksanaan urusan penyuluhan bangunan dan rumah.

METODE

Teknik yang digunakan penulis ini adalah tehnik analisis Deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya berdasarkan hasil penelitian yaitu Pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Kriteria dalam memilih *key informan* dalam penelitian ini adalah mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Adapun yang dijadikan *informan* yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang dapat dipercaya dengan diawasi oleh Kepala bagian pengawasan dari informan tersebut dan ditambah lagi dengan informan lainnya.

HASIL

Gambaran Hasil Penelitian

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan tata ruang wilayah kab/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer. Jalan raya sangat diperlukan oleh setiap orang, karena jalan raya adalah penghubung dari suatu tempat ketempat lainnya. Yang terjadi pada saat ini kondisi jalan sering terjadi kemacetan. Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruang lalu lintas yang mmbatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh – tumbuhan. Muka bumi harus diuji untuk melibatkan kemampuannya untuk menampung beban kendaraan, jika perlu tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang keras agar jalan dapat lebih bertahan lama.

Pengaliran air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan raya, karena air yang berkumpul dipermukaan jalan setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan akan tetapi akan mengikis dan merusakkan jalan karena permukaan jalan sebenarnya tidak betul – betul rata, seharusnya mempunyai landaian yang berarah keselokan dipinggir jalan. Kondisi prasarana jalan di Kota Pekanbaru menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru memang lebih tinggi kondidi jalan yang baik dari yang baiknya, tetapi faktanya jika dilihat dilapangan masih banyak jalan yang dikategorikan rusak. Disini sangat diperlukan adanya pengawasan agar dalam mengerjakan suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana yang dilakukan adalah membangun infrastruktur jalan Kota yang nantinya digunakan oleh semua orang.

Menurut **Brantas (2009:188)** Pengawasan ialah proses pemantauan , penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tidakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Senada dengan pengertian tersebut, **Brantas (2009 : 195)** menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses pengendalian :

1. Menentukan standar – standar yang akan digunakan dasar pengawasan

Penetapan standard dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup standard dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.

2. Mengukur hasil yang telah dicapai

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitive, dengan frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang di ukur.

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Membandingkan adalah membandingkan hasil yang telah di ukur dengan target atau standar yang ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.

4. Mengambil tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah dibawah standard an analisis menunjukan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi pengawasan

Di dalam pengawasan terdapat beberapa fungsi, fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :

- Tetapkan ukuran – ukuran
- Monitor hasil – hasil dan dibandingkan dengan ukuran – ukuran.

- Perbaiki penyimpangan – penyimpangan
- Ubah dan sesuaikan cara – cara pengawasan sehubungan dengan hasil – hasil pengawasan dan perubahan kondisi – kondisi.
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

Pengawasan mencakup suatu upaya dalam memeriksa apakah semua yang telah dikerjakan sesuai dengan rencana atau sebaliknya, dan pengawasan dilakukan agar mencegah terjadinya suatu penyimpangan maupun kesalahan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru perlu dilakukan adanya pengawasan karena apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan maka hasil pembangunan tidak semaksimal dengan rencana yang telah ditentukan, karena jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian serta wawancara yang telah dilakukan penulis di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, bahwa proses pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana dalam menjalankan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan hasil penelitian didalam proses pengawasan terdapat tiga langkah – langkah dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. Proses menentukan standar

Dalam menetapkan standar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan oleh Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Adanya Pembagian Tugas secara jelas
Berdasarkan wawancara pada bagian Perencanaan teknis jalan dan jembatan, di jelaskan bahwa pembagian tugas yang dilakukan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru yaitu berdasarkan dengan golongan dan pendidikan, karena tidak semua pegawai yang berbasic teknik dan masih banyak lagi yang berbasic dibidang lainnya.

- Adanya pembagian waktu dalam pencapaian tujuan
Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang akan dicapai memiliki standar waktu yang tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya untuk bagian Bina Marga khususnya bidang perencanaan teknis jalan dan jembatan dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara mengenai waktu yang diberikan dalam pengerjaan jalan menurut kondisi jalan yang dibuat, apabila tingkat pengerjaannya jalan tidak terlalu banyak

maka diberi waktu 3 bulan dan apabila tingkat pengerjaan jalan yang dibuat sangat panjang dan banyak maka diberikan waktu hingga 5 bulan.

- Adanya anggaran

Anggaran ini adalah yang sangat penting di dalam pembangunan infrastruktur jalan ini karena apabila tidak adanya anggaran pembangunan pun tidak akan dapat terlaksana. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Kepala seksi bidang Bina Marga bagian perencanaan teknis jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengenai berasal dari manakah anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Dari wawancara anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat dengan APBD serta juga dapat bantuan dari Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana percepatan infrastruktur Pembangunan daerah.

2. Melakukan tindakan penilaian dan mengevaluasi

Melakukan penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan standar ukur dan petunjuk – petunjuk arahan yaitu dengan sub indikator sebagai berikut :

- Menilai kinerja Pegawai

Dalam menilai hasil kerja pegawai dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pegawai tersebut dalam menjalankan tugas – tugasnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam system peniaian terhadap hasil kerja dilihat berdasarkan waktu, volume, mutu dan kualitas yang telah dikerjakan dilapangan.

- Mengevaluasi kinerja pegawai

Mengevaluasi kinerja pegawai, sama halnya dengan memberikan penilaian terhadap pegawai tersebut untuk mengukur kinerja para pegawai, bertujuan untuk mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan para pegawai tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas mengenai bagaimana cara mengevaluasi kinerja pegawai dilakukan pada saat diadakannya rapat, pada saat rapat tersebutlah akan dievaluasi bagaimana system kerja pegawai selama ini, dan menurut wawancara diatas rapat hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan saja.

- Mengamati kerjaan pegawai

Mengamati kerjaan pegawai tentunya harus dilakukan oleh seorang pimpinan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut wawancara dengan kepala seksi diatas mengenai pembagian tugas dalam mengamati kerjaan pegawai tersebut dibagi atas struktur organisasi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Jadi pembagian tugas tersebut tidak sembarangan dalam membagi tugas karena ada pembagian struktur organisasinya yang berjenjang.

3. Melakukan tindakan perbaikan

Yaitu tindakan yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apabila memang terjadi kesalahan atau penyimpangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Tahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini terbagi dalam tiga sub indicator yakni :

- Memberikan teguran terhadap penyimpangan

Berdasarkan wawancara diatas mengenai apabila terjadi penyimpangan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru para pegawai juga diberikan sanksi sanksi menurut Undang – undang tentang Kepegawaian, dan apabila ada bangunan yang terdapat kesalahan akan dihancurkan total, tetapi apabila infrastruktur jalan yang telah dibuat terdapat kesalahan yang diperbaiki hanya pada bagian yang tidak sempurna saja bukan mengulang dari awal.

- Memberikan peringatan

Mengenai siapakah yang memberi peringatan kepada pegawai apabila melakukan kesalahan serta bentuk sanksi apa yang diberikan, dalam memberikan peringatan kepada para pegawai yang memberikan peringatan yaitu langsung dari Kepala Dinas, dan Kepala Dinas tersebut member teguran oleh Kepala Bidangny lalu Kepala Bidang tersebutlah yang memberikan sanksi kepada para pegawai yang melakukan kesalahan. Prosesnya hampir serupa dengan proses dalam mengamati pekerjaan pegawai seperti wawancara sebelumnya, berdasarkan struktur organisasinya. Dan sanksi yang diberikan kepada para pegawai yang melakukan kesalahan yaitu berdasarkan Undang – undangng tentang Kepegawaian.

- Memperbaiki apabila terjadi kesalahan

Proses perbaikan diberikan jangka waktu selama kurang lebih 180 hari, dan perbaikan yang diperbaiki hanya bagian jalan yang rusaknya saja.

2. Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan infrastruktur jalan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat pengawasan infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru, artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Dari indikator Sumber Daya Manusia terbagi lagi beberapa sub indikatornya, yaitu jumlah petugas pengawasan dan kualitas petugas pengawasan.

Berdasarkan jumlah pegawai Dari tabel diatas adalah jumlah keseluruhan pegawai yang ada di pada bagian Bina Marga secara keseluruhan hanyalah 37 orang, dapat diketahui berapa pegawai yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara keseluruhan 27orang dan yang masih berstatus honor berjumlah 10orang. Dapat dilihat

pegawai yang sudah PNS sudah lebih banyak dari pada yang masih honor. Jika dilihat jumlah para pegawai yang ada masih sangat kurang, apalagi tugas para pegawai tersebut tidak hanya didalam kantor saja melainkan harus melakukan untuk turun kelapangan dalam melaksanakan pengawasan jalan di Kota Pekanbaru.

b. Dana/biaya

Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dengan sesuai yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru adalah anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu biaya dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam pemerintahan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya administrasi umum dan biaya pemeliharaan.

Anggaran Operasional Pegawai Bidang Bina Marga tahun 2012 (Kec. Sail, Sukajadi dan Senapelan)

Belanja Pegawai	Volume	Harga Satuan	Jumlah 6 = (3x5)
PPTK 1orang x 10 bulan	10.00	500.000.00	5.000.000,00
Pengawas lapangan 2orang x 10 bulan	20.00	300.000.00	6.000.000,00
Staff teknis/admministasi 1orang x 10 bulan	10.00	300.000.00	3.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan			14.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, biaya operasional tiap pegawai yang melakukan pengawasan sebesar Rp. 300.000, yang mana honor tersebut diberikan tiap 5 bulan sekali. Dan setiap satu orang pegawai mengawasi satu jalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari biaya operasional tersebut dapat dikategorikan belum mencukupi dengan kondisi yang ada, karena para pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan masih menggunakan kendaraan pribadi sedangkan tugas yang dilaksanakan adalah tugas untuk kepentingan umum.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat - alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru juga sangat memerlukan fasilitas yang lengkap guna menjalankan tugas – tugas pemerintahan agar tercapai dengan yang telah direncanakan. Dengan adanya sarana dan parsarana yang lengkap Dinas Pekejaan Umum Kota Pekanbaru dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan lancar

Mengenai fasilitas yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sangatlah memprihatinkan, karena fasilitas kendaraan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru khususnya bagian Bina Marga hanya memiliki 1 unit mobil dinas yang hanya dapat digunakan oleh Kepala Bidang bagian Bina Marga, sedangkan fasilitas untuk para staff seperti sepeda motor dinas untuk melakukan pengawasan kelapangan tidaklah disediakan. Hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan kelapangan. Dari sarana dan prasarana yang ada penulis melihat kendaraan yang ada tidak memenuhi syarat dalam melakukan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Jumlah kendaraan yang ada sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yang mana para pegawai yang akan turun kelapangan dalam mengawasi pembangunan jalan akan menjadi terhambat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari tiga indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru bagian Bina Marga yaitu indikator menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan dapat di nilai cukup baik, yang menjadi kendala sekarang ini masalah dalam melakukan tindakan perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru tidak memperbaikinya secara total, melainkan hanya sekedar memperbaiki pada bagian – bagian yang tidak sempurna saja atau pada bagian yang rusak dengan cara menambalnya saja. Dari cara penambalan itulah yang mengakibatkan jalan menjadi tidak sempurna sehingga jalan menjadi cepat rusak.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, tentang faktor-faktor pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang menjadi penghambat pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa indikator dan sub indikatornya, indikator yang pertama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), dari indikator SDM ini terdapat dua sub indikator yakni : jumlah petugas pengawas dan kualitas petugas pengawas. Yang menjadi kendala dari segi Sumber Daya Manusia yang pertama yaitu jumlah petugas pengawas yang ada pada saat ini sangatlah minim, dari segi kualitas para pengawas juga sangat kurang petugas pengawas bisa di kategorikan kurang baik, karena pendidikan petugas banyak hanya pada tingkat STM dengan kata lain belum memiliki *skill* yang cukup masuk pada kriteria, dan para petugas sudah tidak pernah mengikuti adanya pelatihan – pelatihan tentang jalan. Sedangkan pada indikator yang kedua yang menjadi penghambat pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru yakni dari segi anggaran / dana : anggaran/ dana yang dimaksud adalah dana operasional untuk melakukan pengawasan. Dana operasional yang dimaksud adalah dana untuk melakukan pengawasan dilapangan, karena menurut wawancara diatas para petugas juga enggan apabila mereka tidak diberikan dana operasional dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Dan yang terakhir yang menjadi faktor penghambat pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru yaitu fasilitas, sub indikator dari fasilitas ini adalah sarana dan prasarana bagi para pengawas atau bisa disebut dengan kendaraan operasionalnya. Fasilitas disini

juga termasuk faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru, karena menurut wawancara diatas para petugas pengawas bisa dikatakan lambat apabila tidak diberikan kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan jalan dilapangan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum hendaknya selalu tepat dan tegas dalam menjalankan tugas mengawasi infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.
2. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru lebih memperhatikan masalah pelatihan – pelatihan pengawasan infrastruktur jalan yang bisa dikategorikan sangat kurang, guna meningkatkan kualitas SDM untuk seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum.
3. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru hendaknya menempatkan para pegawai sesuai dengan keahlian, dengan melihat latar belakang pendidikan formal yang dimiliki.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru lebih memperhatikan pembelanjaan untuk Dinas Pekerjaan Umum yang bisa dikatakan minim untuk anggaran operasional dan lain-lain.
5. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menambah jumlah kendaraan operasional untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal (1993), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Amin Widjaja Tunggal (1995), *Struktur Pengendalian Intern*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Anthony, Catanese.J & James, Snyder C (1988), *Perencanaan Kota*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Brantas (2009), *Dasar – dasar Manajemen*, Bandung : Penerbit Alfabet.
- Budiharjo, Eko (1995), *Tata Ruang Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Budiharjo, Eko (1997), *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung : Penerbit PT. Alumni.
- Daft Richard, L (2007), *Manajemen*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Dwijowito, Riant Nugroho (2003), *Reiventing Pembangunan*, Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Dwijdjowijoto, Riant Nugroho & Wrihatnolo R, Randy (2006), *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- DW. Nana Rukmana (dkk), (1993), *Manajemen Pembangunan Prasarana Kota*, Jakarta : Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Herujito, Yayat (2004), *Dasar – dasar Manajemen*, Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Kustur, Raldi Hendro (2001), *Dimensi Keruangan Kota*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Manullang (2006), *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press
- Mukti, Sri Handoyo (dkk) (1995), *Manajemen Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Mulyadi & Setiawan Jhony (2001), *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Penerbit Salemba empat.
- Robbins Stephen. P & Coultermarary (1999), *Manajemen edisi ke 2*, Jakarta : Penerbit PT. Prenhallindo.
- Robbins Stephen. P & Coultermarary (2002), *Manajemen edisi ke 7*, Jakarta : Penerbit PT. indeks group gramedia.
- Siswanto, (2005), *Pengantar Manajemen*, Bandung :Penerbit Bumi Aksara.